

Generasi Muda: Agen Pendidik Politik Beretika

Politik menjadi salah satu istilah yang turut mengalami penyempitan makna diantara berbagai istilah lainnya. Fenomena ini juga ditemukan penulis saat bertatap muka dengan para mahasiswa dalam kelas perkuliahan. Ketika mereka ditanya "Apa yang Anda pahami tentang politik?", jawaban yang selalu muncul yaitu "politik adalah kekuasaan, kepentingan, kekayaan".

Melihat definisi sempit politik yang hanya berfokus pada kepentingan individu, menjadi hal yang penting untuk merefleksikan kembali definisi konsep politik. Pertanyaan yang selanjutnya muncul adalah "Apakah politik hanya dijalankan untuk mencapai kepentingan individu?" dan "Apakah politik itu buruk atau sama sekali tidak membawa manfaat bagi kesejahteraan semua orang?".

Politik Beretika: Definisi Normatif di tengah Praktik Pragmatis

Jauh sebelum istilah politik muncul, manusia sebenarnya telah melakukan atau terlibat aktif dalam proses politik. Politik berlangsung ketika sebuah komunitas masyarakat mengelola sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan bersama. Kebutuhan setiap individu yang harus dipenuhi pada kenyataannya dihadapkan pada permasalahan keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan semua orang.

Agar tidak terjadi konflik, masyarakat kemudian sadar bahwa harus terdapat orang-orang terpilih yang memegang kekuasaan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Ketika kebutuhan setiap orang tidak dapat dipenuhi, harus dapat dirumuskan keputusan terbaik yang mampu memuaskan semua pihak. Berdasarkan proses ini politik dapat didefinisikan sebagai penggunaan kekuasaan yang diarahkan untuk mengelola sumber daya yang terbatas dalam rangka mencapai keputusan terbaik demi kebahagiaan semua pihak.

Secara lebih komprehensif, definisi politik ini terkonfirmasi dari unsur-unsur politik yang disampaikan oleh Prof. Miriam Budiardjo dalam bukunya "Dasar-Dasar Ilmu Politik". Budiardjo menjelaskan bahwa politik mencakup beberapa unsur yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan serta alokasi dan distribusi. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, politik dapat dirumuskan sebagai proses pengambilan keputusan oleh negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk menghasilkan kebijakan dalam rangka melakukan alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas.

Berdasarkan tinjauan filsafat, definisi politik tersebut menempatkan dasar etika yang tinggi karena kepentingan bersama menjadi orientasi utama dari proses politik. Apabila ditinjau secara historis, istilah politik sendiri juga muncul dari upaya penggunaan kekuasaan untuk mencapai

tujuan bersama. Dari dua pendekatan ini, dapat disimpulkan bahwa esensi politik secara normatif adalah proses penggunaan kekuasaan oleh negara untuk mencapai kebaikan bersama. Ketika politik dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan bersama maka proses tersebut dapat disebut sebagai politik normatif, proses politik yang mulia atau politik beretika.

Bertolak dari pemahaman normatif tersebut, masyarakat Indonesia saat ini memiliki pandangan tersendiri dalam mendefinisikan politik. Berdasarkan praktik yang berlangsung dan terus berkembang, politik selalu dikaitkan dengan usaha politisi atau pemegang kekuasaan untuk memenuhi kepentingan pribadi semata. Proses politik hanya diarahkan untuk mengakomodasi kepentingan, kebutuhan, kebahagiaan dan kesejahteraan individu sehingga sering disebut sebagai proses yang pragmatis. Pola pikir yang kemudian diterima sebagai kebenaran oleh masyarakat luas yaitu politik adalah proses yang 'kotor' dan tidak bermanfaat bagi kesejahteraan umum. Politisi juga dipandang sebagai aktor yang tidak memiliki dasar moral yang baik atau dapat dikatakan tidak beretika.

Kehadiran definisi politik pragmatis yang saat ini melekat erat di benak masyarakat umum merupakan dampak dari maraknya praktik politik yang mengedepankan kepentingan individu. Perilaku para politisi yang berfokus pada kepentingan pribadi secara tidak langsung mendidik publik untuk menerima pemahaman bahwa politik adalah proses yang sangat pragmatis. Pada akhirnya proses ini mengaburkan definisi dan praktik politik beretika. Pandangan bahwa politik secara etis dilaksanakan untuk tujuan yang mulia justru tergantikan oleh pandangan umum bahwa politik itu 'jahat' dan hanya bermanfaat bagi para penguasa.

Politik Beretika dan Peran Strategis Generasi Muda

Saat ini pemaknaan politik pragmatis kian meluas seiring praktik pragmatis yang marak dilakukan oleh para politisi. Media menjadi aktor utama yang memiliki peran signifikan pada proses tersebut. Bagi media, praktik-praktik politik pragmatis seperti korupsi, penerimaan suap, gratifikasi, dan lain sebagainya menjadi materi berita yang bernilai jual tinggi. Pemberitaan politik yang terus dilakukan media pada akhirnya membentuk opini publik bahwa proses politik hanya terbatas pada usaha akomodasi kepentingan pribadi.

Ditengah dominasi media dalam menyebarkan paham politik pragmatis, terdapat harapan pada generasi muda untuk menghadirkan kembali makna politik normatif dan praktik politik beretika. Harapan ini muncul saat mereka semakin jenuh dengan praktik politik yang menempatkan kepentingan-kepentingan individu di atas kepentingan umum. Asa tersebut juga menguat seiring perkembangan bentuk-bentuk partisipasi dan berbagai gerakan politik informal

yang digagas oleh generasi muda.

Salah satu bukti nyata perhatian generasi muda terhadap politik beretika terlihat dari gerakan dukungan bagi calon pemimpin daerah melalui jalur independen. Ketika golongan muda memandang bahwa seorang pemimpin layak untuk diperjuangkan, secara aktif mereka menginisiasi dukungan di luar jalur partai politik. Fenomena ini juga menegaskan bahwa generasi muda merupakan generasi yang cerdas dan memiliki kepedulian. Ketika partai politik dipandang tidak mampu menghadirkan sosok pemimpin ideal, secara sukarela mereka mendorong pencalonan politisi-politisi beretika untuk dapat terpilih sebagai pemimpin.

Di era yang semakin demokratis seperti sekarang ini, peran generasi muda sebenarnya tidak hanya terbatas pada perkembangan bentuk-bentuk partisipasi untuk mendorong kemunculan politisi beretika. Lebih dari itu, mereka memiliki peran yang sangat strategis dalam menyebarkan makna politik beretika. Generasi muda bahkan dapat disebut sebagai poros terdepan dalam gerakan revolusi budaya politik di tengah masyarakat. Mereka menjadi tumpuan perubahan pola pikir politik dari pemaknaan pragmatis ke pemaknaan normatif. Peran strategis generasi muda tersebut setidaknya dapat dipahami dari dua fenomena besar yang saat ini terjadi.

Pertama, peran strategis generasi muda dalam memberikan pendidikan politik beretika dapat dipahami dari fenomena kemunculan pemimpin-pemimpin muda. Seiring desentralisasi pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah, semakin banyak generasi muda terpilih sebagai pejabat politik. Golongan muda kian marak mengisi pos pimpinan politik di tingkat daerah. Gubernur, wali kota, bupati serta anggota DPRD saat ini mulai dijabat oleh politisi dengan rentang usia 30-40 tahun. Pada tahun 2012, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) bahkan pernah mencatat rekor bupati berusia 28 tahun sebagai bupati termuda di Indonesia.

Gelombang kemunculan pemimpin muda di Indonesia menjadi cerminan bahwa saat ini generasi muda semakin dipercaya oleh publik. Golongan muda dinilai mampu membawa perubahan kesejahteraan dan dipandang memiliki dasar etika yang lebih baik dalam berpolitik. Kepercayaan terhadap kepemimpinan generasi muda yang terus meningkat seharusnya berdampak pada perubahan pemaknaan politik masyarakat. Melalui teladan perilaku politik pemimpin muda, masyarakat semestinya mulai sadar dan terdidik bahwa proses politik tidak hanya terbatas pada usaha mengakomodasi kepentingan pribadi namun merupakan proses perjuangan kepentingan bersama.

Kedua, peran strategis generasi muda dalam menyebarkan paham politik beretika dapat diketahui dari dominasi mereka dalam perkembangan media. Di era teknologi yang maju pesat seperti saat ini, generasi muda menjadi golongan masyarakat yang paling dekat dengan media. Kaum muda adalah kelompok masyarakat yang paling 'melek' teknologi. Media berbasis teknologi yang terus berkembang, termasuk berbagai bentuk media sosial, selalu dapat diakses dan dimanfaatkan oleh generasi muda.

Melihat posisi generasi muda yang sangat dekat dengan perkembangan teknologi, dapat dipahami bahwa mereka mampu menjadi agen penting dalam melakukan pendidikan politik beretika kepada seluruh lapisan masyarakat. Apabila sebelumnya media secara komersial gencar memberitakan paham politik pragmatis, generasi muda secara etis berpeluang besar menyebarkan paham politik beretika melalui berbagai jenis media. Melalui kreativitas dan aplikasi teknologi pada media, golongan muda dapat dengan mudah menyebarkan pesan bahwa politik tidak selamanya buruk namun sangat bermanfaat bagi pencapaian tujuan kesejahteraan umum.

Dari dua fenomena yang diamati oleh penulis, secara sederhana terdapat dua faktor kunci yang menjelaskan peran strategis generasi muda dalam menjadi agen pendidik politik beretika yaitu keteladanan pemimpin dan penguasaan media. Ketika generasi muda dipercaya menjadi pemimpin, secara tidak langsung mereka menyebarkan paham politik beretika. Mereka mendidik masyarakat dengan memberikan keteladanan bahwa politisi tidak selalu hanya berorientasi pada pemenuhan kepentingan pribadi. Pada sisi lain, generasi muda juga menjadi agen pendidik politik beretika ketika dirinya menguasai perkembangan media. Generasi muda secara cepat menggantikan dominasi media komersial yang kerap kali memenjarakan pola pikir masyarakat dalam pemahaman politik pragmatis.

(Trisno Sakti Herwanto, Dosen Muda Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Katolik Parahyangan. Pengajar Mata Kuliah Ilmu Politik & Politik Indonesia.) #LombaEsaiPolitik